

# PERANAN PERANGKAT KECAMATAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN CAMAT PADA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN MALALAYANG

*Oleh*

**Andika Lontoh**

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan perangkat Kecamatan Malalayang dalam pengambilan keputusan camat pada pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Malalayang. Secara operasional yang dimaksudkan dengan staf dalam penulisan ini adalah seluruh perangkat kecamatan sebagai bawahan dari Camat Kecamatan Malalayang. Peranan perangkat Kecamatan Malalayang sebagai staf dalam rangka membantu camat mengambil keputusan, dilihat dari bagaimana perangkat Kecamatan Malalayang memberikan usul/saran berfungsi memecahkan masalah mencari alternatif pemecahannya, menela menganalisa dan menetapkan alternatif pemecahannya dan merumuskannya secara lengkap dan matang, untuk kemudian disarankan/diajukan kepada camat, sehingga camat dapat menjadikan kajian untuk menyetujui atau menolaknya.*

*Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dalam penelitian ini sesuai dengan Dalam Peraturan Daerah Kota Manado No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kota Manado, Pemerintah Kecamatan terdiri dari : Camat dan Perangkat Kecamatan, sedangkan perangkat Kecamatan terdiri dari ; Sekretaris Kecamatan, Kepala-kepala Seksi dan pelaksana.*

*Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, fokus pada peranan perangkat Kecamatan Malalayang sebagai unsur staf untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan camat pada pelaksanaan pemerintahan. Yang menjadi informan adalah camat dan perangkat kecamatan diambil secara purposive yang jumlahnya 21 orang pegawai. Pengumpulan data dilakukan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan tentang peranan perangkat Kecamatan Malalayang sebagai unsur staf dalam pengambilan keputusan camat pada pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Malalayang.*

*Hasil penelitian bahwa Camat Kecamatan Malalayang bahwa keputusan yang diambil dalam pelaksanaan pemerintahan yaitu selalu mengadaakaan koordinasi dan pengawasan pada pelaksanaan pemerintahan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi koordinasi dalam manajemen pemerintahan akan memberikan peranan dalam meningkatkan pelayanan pegawai di lingkungan organisasi Pemerintah Kecamatan Malalayang Kota Manado. Baiknya pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado menyebabkan kinerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih baik.*

## **PENDAHULUAN**

Inti daripada kepemimpinan sebagai fungsi seorang pemimpin adalah mengambil keputusan adalah merupakan tanggung jawab seorang pemimpin atau kepala. Namun demikian walaupun tugas dan tanggung jawab pengambilan keputusan dalam organisasi (terutama organisasi besar dan luas) itu berada pada seorang pemimpin tertinggi dalam organisasi, bukanlah berarti bahwa anggota-anggota organisasi lainnya atau para staf tidak perlu diikutsertakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan perangkat Kecamatan Malalayang dalam pengambilan keputusan Camat pada pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Malalayang.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **a. Konsep Peranan Perangkat Kecamatan**

Menurut Soerjono Soekanto (1990 : 146) peranan adalah aspek dinamis dari status. Peranan ini selanjutnya berwujud kegiatan yang merupakan suatu fungsi kepemimpinan yang berusaha melaksanakan atau menyaksikan sesuatu yang menjadi kepentingan bersama.

Dalam Peraturan Daerah Kota Manado No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kota Manado, Pemerintah Kecamatan terdiri dari : Camat dan Perangkat Kecamatan. Perangkat Kecamatan terdiri dari ; Sekretaris Kecamatan, Kepala-kepala Seksi dan pelaksana. Peranan perangkat Kecamatan mengandung arti, bagian tugas utama yang harus dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala-kepala Seksi dan pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik .

#### **b. Peranan Staf dalam Rangka Proses Pengambilan Keputusan**

Dalam organisasi modern yang besar dan melibatkan banyak orang, proses pengambilan keputusan tidak sesederhana yang disebutkan di atas. Oleh karena walaupun tugas dan tanggung jawab terakhir pengambilan keputusan itu pada seorang pemimpin (*administrator*), bukanlah berarti bahwa orang lain atau staf lainnya tidak perlu dilibatkan di dalam prosesnya.

Richard M. Steers (1980:174) dalam kaitan dengan maksud ini menyatakan bahwa, persoalan utama dalam kaitan dengan ancangan manajemen pada pengambilan keputusan ialah sejauh mana pimpinan atau manager mengizinkan (atau harus mengizinkan) bawahan partisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Dikatakan bahwa pengambilan keputusan yang demokratis merupakan usaha mendesentralisasi wewenang dan pengaruh ke seluruh organisasi. Dan umumnya orang sependapat, bahwa tindakan semacam ini berakibat meningkatnya mutu kepuasan, meningkatnya keterikatan anggota pada hasil keputusan dan meningkatkan keputusan buat keterlibatan mereka.

Siagian dalam bukunya Peranan Staf dalam Manajemen, menyatakan bahwa pekerjaan orang-orang staf adalah pendukung kegiatan manajemen, dan bertugas untuk membuat para pemimpin lini menjadi pimpinan yang lebih efektif. Staf bergerak dalam bidang peningkatan kemampuan kerja dan merealisasikan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. (Siagian, 1978:123-124).

Secara operasional yang dimaksudkan dengan staf dalam penulisan ini adalah seluruh perangkat kecamatan sebagai bawahan dari Camat Kecamatan Malalayang. Peranan perangkat Kecamatan Malalayang sebagai staf dalam rangka membantu camat mengambil keputusan, dilihat dari bagaimana perangkat Kecamatan Malalayang memberikan usul/saran berfungsi memecahkan masalah mencari alternatif pemecahannya, menela menganalisa dan menetapkan alternatif pemecahannya dan merumuskannya secara lengkap dan matang, untuk kemudian disarankan/diajukan kepada camat, sehingga camat dapat menjadikan kajian untuk menyetujui atau menolaknya.

Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dalam penelitian ini sesuai dengan Dalam Peraturan Daerah Kota Manado No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kota Manado, Pemerintah Kecamatan terdiri dari : Camat dan Perangkat Kecamatan, sedangkan perangkat Kecamatan terdiri dari ; Sekretaris Kecamatan, Kepala-kepala Seksi dan pelaksana.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Penelitian ini terfokus pada peranan perangkat Kecamatan Malalayang sebagai unsur staf untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan camat pada pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Malalayang. Yang menjadi informan adalah camat dan seluruh pegawai sebagai perangkat kecamatan yang bekerja pada Kantor Kecamatan Malalayang, baik yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan (sekcama, kepala-kepala seksi, kepala urusan) staf pembantu pimpinan, maupun para staf biasa pegawai yang sebagai pelaksana. Informan diambil secara purposive yang jumlahnya 21 orang pegawai.

Pengumpulan data dilakukan wawancara dengan para informan akan dipergunakan pedoman wawancara terstruktur untuk memperoleh sesuatu informasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tentang peranan perangkat Kecamatan Malalayang sebagai unsur staf

dalam pengambilan keputusan camat pada pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Malalayang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Peranan perangkat kecamatan dalam proses pengambilan keputusan camat dalam pelaksanaan pemerintahan dilihat dari tahapan langkah dalam proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah proses pengambilan keputusan dalam penelitian ini, diklasifikasi/dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu:

- Tahap perumusan dan analisa masalah
- Tahap pengembangan/menetapkan alternatif pemecahan masalah, dan
- Tahap memilih/menentukan alternatif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Malalayang bahwa keputusan yang diambil dalam pelaksanaan pemerintahan yaitu selalu mengadaakan koordinasi dan pengawasan pada pelaksanaan pemerintahan. Menurut Camat sebagai Pemerintah Kecamatan Malalayang mengambil keputusan untuk melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan karena tujuan pelaksanaan koordinasi antara lain untuk ; menghindari kesimpang siuran, konflik antara unit kerja/bagian-bagian dalam kantor, atau mencegah timbulnya kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi koordinasi dalam manajemen pemerintahan akan memberikan peranan dalam meningkatkan pelayanan pegawai di lingkungan organisasi Pemerintah Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Baiknya pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado menyebabkan kinerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih baik. Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan, terlihat bahwa ada sebagian kecil memberikan tanggapan yang mereka kurang dilibatkan dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Hal ini disebabkan oleh manajemen camat untuk memberikan kewenangan kepada perangkat yang mempunyai jabatan di kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap para pelaksanan di unit-unit kerja masing-masing.

## **P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

1. Peranan perangkat kecamatan dalam proses pengambilan keputusan camat dalam pelaksanaan pemerintahan dilihat dilihat dari tahapan langkah dalam proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah proses pengambilan keputusan dalam penelitian ini, diklasifikasi/dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu: tahap perumusan dan analisa masalah, tahap pengembangan/menetapkan alternatif pemecahan masalah, dan tahap memilih/menentukan alternatif.
2. Peran perangkat Kecamatan Malalayang di dalam rapat pengambilan keputusan khususnya keterlibatan dalam perumusan masalah, telah memperlihatkan adanya peranan yang cukup besar dari para perangkat kecamatan/staf di dalam salah satu langkah dari proses pengambilan keputusan.
3. Tahap mengembangkan atau menetapkan alternatif merupakan tahapan berikutnya setelah masalah dirumuskan/ditetapkan. Pengembangan alternatif-alternatif adalah kegiatan analisa untuk menemukan berbagai macam alternatif yang mungkin dapat dipergunakan oleh pimpinan dalam pemecahan masalah. Hasil penelitian telah memperlihatkan adanya kesiapan staf dalam setiap rapat dengan camat, dimana sebahagian besar dari mereka selalu menyiapkan data dan informasi guna pengembangan alternatif pemecahan masalah.
4. Dari data hasil penelitian terhadap perangkat kecamatan Malalayang yang mempunyai jabatan menyatakan bahwa saran/usul yang diajukan staf atau perangkat kecamatan kepada camat untuk pemecahan masalah/pengambilan keputusan selalu berbentuk lengkap/matang sehingga camat sebagai pimpinan tinggal menyetujui/menandatangani atau menolak.
5. Keputusan yang diambil dalam pelaksanaan pemerintahan yaitu selalu mengadaakaan koordinasi dan pengawasan pada pelaksanaan pemerintahan. Keputusan yang diambil untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi koordinasi dalam manajemen pemerintahan, dari data hasil analisis terlihat bahwa ada kecenderungan semakin baik pelaksanaan fungsi koordinasi akan semakin baik penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Malalayang Kota Manado. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi koordinasi dalam manajemen pemerintahan akan memberikan peranan dalam meningkatkan pelayanan pegawai di lingkungan organisasi Pemerintah Kecamatan Malalayang Kota Manado.
6. Pelaksanaan pengambilan keputusan camat untuk meningkatkan pengawasan meningkatkan disiplin kerja di dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Kecamatan Malalayang dalam pelaksanaan pemerintahan. Baiknya

pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado menyebabkan kinerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih baik.

7. Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan, terlihat bahwa ada sebagian kecil memberikan tanggapan yang mereka kurang dilibatkan dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Hal ini disebabkan oleh manajemen camat untuk memberikan kewenangan kepada perangkat yang mempunyai jabatan di kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap para pelaksana di unit-unit kerja masing-masing.

## B. Saran-Saran

1. Disarankan agar perangkat kecamatan selalu siap dalam berperan untuk membantu camat dalam menyiapkan data dan informasi guna pengembangan alternatif pengambilan keputusan yang dilakukan oleh camat.
2. Dalam mengambil keputusan pada pelaksanaan pemerintahan hendaknya camat tetap mengadakan koordinasi baik secara intern maupun ekstern karena terlihat bahwa ada kecenderungan semakin baik pelaksanaan fungsi koordinasi akan semakin baik penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Malalayang Kota Manado.
3. Disarankan agar pelaksanaan pengambilan keputusan camat untuk meningkatkan pengawasan perlu tetap dilakukan secara kontinu karena dengan pengawasan dapat meningkatkan disiplin kerja di dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Kecamatan Malalayang dalam pelaksanaan pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 1997, "Prosedur Penelitian," Rineka Cipta, Bandung.
- Atmosudirdjo Prajudi, 1984. Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan. Jakarta : Seri Pustaka Ilmu Administrasi.
- Gie The Liang, dkk, 1982. Ensiklopedia Administrasi. Yogyakarta : PT. Gunung Agung.
- Handayani Soewarno, 1982. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_, 1982. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Miles dan Herman. 1992, "Metode Penelitian Kualitatif," Gunung Agung, Jakarta.
- Moleong. L.J. 1997, "Metode Penelitian Kualitatif," Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, S. 1998. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, H. 1990, "Metode Penelitian Kualitatif," UGM Press, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1974. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Subagyo, Joko. 2006. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono, 2005, "Metode Penelitian Kualitatif," Alfabeta, Bandung
- Siagian S.P. 1978. Peranan Staf dalam Management. Jakarta : Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_, 1980. Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan. Jakarta : Gunung Agung.
- Soekanto Soerjono., 1990 Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta.
- Steers, Richard M, 1980. Organisasi Effectiveness a Behavioral View, Terjemahan. Erlangga Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: Refika Aditama
- Terry George R. 1986. Azas-azas Management, Alih Bahasa Winardi. Bandung : Alumni.
- Thoha Miftha., 1995. Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Tindakan Prilaku, P.T. E Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Verger K.J., 1981. Sosiologi Pengetahuan, FISIP UI , Jakarta.
- Sumber-sumber lain :
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
- Peraturan Daerah Kota Manado No. 6 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kota Manado.